



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA
PERIMBANGAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

ROTHSALINA AGUSTIA PASARIBU
NPM 1715210057

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2022**



FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ROTHSALINA AGUSTIA PASARIBU
NPM : 1715210057
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN
JENJANG : SI (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENDAPATAN ASLI
DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN
BELANJA DAERAH TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

Medan, Januari 2022

KETUA PROGRAM STUDI

(Dr. Bakhtiar Efendi, S.E, M.Si.)



(Dr. Onny Mediatine, S.H, M.Kn)

PEMBIMBING I

(Dewi Mahrani Rangkuty, S.E., M.Si.,)

PEMBIMBING II

(Mohammad Yusuf, S.H., M.Si.,)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

Skripsi Diterima Dan Disetujui Oleh Panitia Ujian Sarjana Lengkap Fakultas
Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : ROTHSALINA AGUSTIA PASARIBU
NPM : 1715210057
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENDAPATAN ASLI
DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN
BELANJA DAERAH TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

Medan, Januari 2022

KETUA

(Rahmad Sembiring, SE., M.SP)

ANGGOTA I

(Dewi Maharani Rangkyu, S.E., M.Si.)

ANGGOTA II

(Mohammad Yusuf, S.H., M.Si.)

ANGGOTA III

(Diwayana Putri Nasution, SE., M.Si.)

ANGGOTA IV

(Annisa Ilmi Faried, S.SOS., M.SP)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : ROTHSALINA AGUSTIA PASARIBU
NPM : 1715210057
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENDAPATAN ASLI
DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN
BELANJA DAERAH TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsi melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan tidak benar.



dan, Januari 2022

(Rothsalina Agustia Pasaribu)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : ROTHSALINA AGUSTIA PASARIBU
NPM : 1715210057
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENDAPATAN ASLI
DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN
BELANJA DAERAH TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTAERA

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada fakultas Sosial sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Sehubungan dengan hal tersebut maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang. Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.



lan, Januari 2022

Rothsalina Agustia Pasaribu
(Rothsalina Agustia Pasaribu)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: ROTHSA LINA AGUSTIA PASARIBU
Tempat/Tgl. Lahir	: Denpasar / 10 Agustus 1997
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1715210057
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi	: Ekonomi Publik & SDA
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 121 SKS, IPK 3.25
Nomor Hp	: 082165841043

Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai

: berikut

No.	Judul
	PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Coret Yang Tidak Perlu

Medan 21 Januari 2021



Rektor I,

(Cahyo Pramono, S.E., M.M.)

Pemohon,

(Rothsa Lina Agustia Pasaribu)

Tanggal :
Disahkan
oleh :
Dekan

(Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.)

Tanggal 21 Januari 2021
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :

(Dewi Mahrani Rangkyu, SE., M.Si)

Tanggal :
Disetujui oleh:
Ka. Prodi Ekonomi Pembangunan

(Bakhtiar Efendi, SE., M.Si)

Tanggal : 21 Januari 2021
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing II:

(Mohammad Yusuf, SH., M.Si)



ACC Ujian
Seminar
PropoSAI
DP-I
29/05/2021

(M. Yusuf)

[Signature]

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN
DAN BELANJA DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

PROPOSAL

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains,
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

ROSTHALINA AGUSTIA PASARIBU
NPM 1715210057

**PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

ACC Ujian Sidang Meja Hijau
DP-I
7/12/2021

ACC Skripsi:

[Handwritten signature]
10/12-21
[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA
PERIMBANGAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

**ROTHSALINA AGUSTIA PASARIBU
NPM 1715210057**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

ACC Jilid Lux
DP-1
25/01/2022



Acc Jilid Lux
DP - 2
26-01-2022



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA
PERIMBANGAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

**ROTHSALINA AGUSTIA PASARIBU
NPM 1715210057**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2022**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Jl. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ROTHSA LINA AGUSTIA PASARIBU
NPM : 1715210057
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Jenjang Pendidikan : S1
Dosen Pembimbing : Mohammad Yusuf, SH., M.Si
Judul Skripsi : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH , DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAERAH PROVINSI SUMATERA

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
29 April 2021	Proposal Skripsi sdh ACC	Disetujui	
29 November 2021	Ok Acc skripsi	Disetujui	
22 Januari 2022	Perlu direvisi 33 kabupaten kota di sumut, sehingga penulisan skripsi dgn lokasi Provinsi Sumatera Utara, tidak pake lokasi 33 Kabupaten kota di Sumut, sehingga utk rymusan masalah, manfaat penelitian, hipotesis dan bab I pendahuluan tdk lagi menggunakan 33 kabupaten kota...	Revisi	
26 Januari 2022	Sudah dilakukan revisi, acc utk jilid lux tgl.26 jan.22.	Disetujui	

Medan, 27 Januari 2022
Dosen Pembimbing,



Mohammad Yusuf, SH., M.Si



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Jl. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ROTHSA LINA AGUSTIA PASARIBU
NPM : 1715210057
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Dewi Mahrani Rangkuty, SE., M.Si
Judul Skripsi : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH , DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAERAH PROVINSI SUMATRA

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
07 Juni 2021	ACC Seminar Proposal per tgl 29/05/2021	Disetujui	
07 Desember 2021	sudah email file revisian terakhir per tgl 29/11/2021 dan ACC Ujian Sidang Meja Hijau 7/12/2021	Disetujui	
25 Januari 2022	sudah revisi dan email kembali; ACC Jilid Lux per tgl 25/01/2022	Disetujui	

Medan, 27 Januari 2022
Dosen Pembimbing,



Dewi Mahrani Rangkuty, SE., M.Si

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 12/9/2021 2:27:18 PM

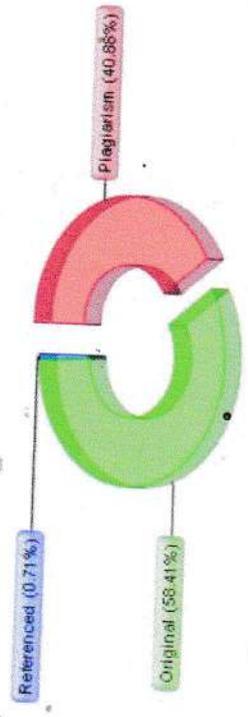
Analyzed document: ROTHASALINA_1715210057_Ekonomi Pembangunan.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

- Comparison Preset: Rewrite Detected language: Id
- Check type: Internet Check [tee_and_enc_string] [tee_and_enc_value]

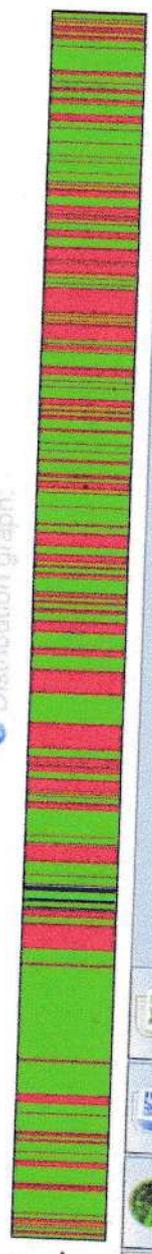


Detailed document body analysis:

Relation chart



Distribution graph:





SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 1055/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
nama saudara/i:

: ROTHSA LINA AGUSTIA PASARIBU

: 1715210057

at/Semester : Akhir

as : SOSIAL SAINS

an/Prodi : Ekonomi Pembangunan

sannya terhitung sejak tanggal 07 Desember 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku
us tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 07 Desember 2021

Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



UPT. Rahmad Budi Utomo, ST., M.Kom

Dokumen : FM-PERPUS-06-01

isi : 01

Efektif : 04 Juni 2015

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 08 Desember 2021
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROTHSA LINA AGUSTIA PASARIBU
Tempat/Tgl. Lahir : Denpasar / 1997-08-10
Nama Orang Tua : BERLIN PASARIBU
N. P. M : 1715210057
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
No. HP : 082165841043
Alamat : Dusun V telaga sari

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAERAH PROVINSI SUMATRA UTARA.**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga : L

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



ROTHSA LINA AGUSTIA PASARIBU
1715210057

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh BPK dan data statistik dari www.bps.go.id. Kriteria sampel penelitian meliputi seluruh 33 Kabupaten/Kota Sumatera Utara pada tahun 2018-2019 dengan SPSS versi 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Secara simultan pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja daerah berpengaruh secara bersama-sama terhadap indeks pembangunan manusia provinsi Sumatera Utara. Sebaiknya menambah variabel penelitian lain diluar variabel penelitian ini untuk lebih meningkatkan pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Setiap pemerintah di provinsi Sumatera Utara yang ada di Indonesia lebih meningkatkan investasi dalam bentuk fisik sehingga aset tetap tiap tahun meningkat, sehingga dengan adanya sarana yang meningkat maka dapat mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci : Belanja Daerah, Dana Perimbangan, Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of regional original income, balancing funds and regional expenditures on the human development index. The analytical method used in this research is multiple linear analysis. This type of research is quantitative research using secondary data from local government financial reports that have been audited by BPK and statistical data from www.bps.go.id. The research sample criteria include all 33 regencies/cities of North Sumatra in 2018-2019 with SPSS version 20. The results show that local revenue, balancing funds have an effect on the human development index. Meanwhile, regional spending has no significant effect on the human development index. Simultaneously, local revenue, balancing funds and regional expenditures have an effect on the human development index of the province of North Sumatra. It is better to add other research variables outside of this research variable to further increase the influence on the human development. Each government in the province of North Sumatra in Indonesia further increases investment in physical form so that fixed assets increase every year, so that with the increased facilities, it can support the economic welfare of the community.

Keywords: balancing funds, human development index, local revenue, regional expenditures,

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang maha esa, yang atas rahmatnya maka penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi yang berjudul **“Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia daerah provinsi sumatera utara”**.

Dalam menyelesaikan proposal skripsi ini, peneliti telah mendapatkan banyak bimbingan, baik petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat serta bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Dr. Bakhtiar Efendi, S.E, M.Si., selaku ketua Jurusan Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Sosial Sains Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Dewi Mahrani Rangkuty, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing I yang sudah banyak membantu saya dan memberikan kritik maupun saran terhadap perbaikan proposal skripsi saya.
5. Bapak Mohammad Yusuf, S.H., M.Si., selaku dosen pembimbing II yang sudah banyak membantu saya dan memberikan masukan terhadap perbaikan skripsi saya.

6. Seluruh bapak dan ibu dosen jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Sosial Sains Universitas PancaBudi.
7. Kedua orang tua tercinta, Berlin Pasaribu dan Minar Br Nababan yang telah memberikan perhatian dan kasih sayangnya yang tak terhingga baik materi maupun spiritual.

Medan, Januari 2022
Penulis

Rothsalina Agustia Pasaribu
NPM: 1715210057

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	11
1. Identifikasi Masalah	11
2. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Manfaat Penelitian	13
E. Keaslian Penelitian	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Landasan Teori	15
1. Pendapatan Asli Daerah.....	15
2. Dana Perimbangan.....	21
3. Belanja Daerah.....	23
4. Indeks Pembangunan Manusia.....	27
B. Penelitian Terdahulu	29
C. Kerangka Konseptual.....	34
D. Hipotesis	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	37
D. Jenis dan Sumber Data.....	40
E. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Perkembangan Variabel Penelitian	45
4.2 Hasil Penelitian	47
4.3 Pembahasan	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	61

5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	63

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran	4
Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	7
Tabel 1.3 Keaslian Penelitian	14
Tabel 2.1 Daftar Penelitian Sebelumnya	29
Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian	37
Tabel 3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	38
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif.....	46
Tabel 4.2 <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	49
Tabel 4.3 Uji Multikolinieritas	50
Tabel 4.4 Uji Autokorelasi	51
Tabel 4.5 Analisis Regresi Linear Berganda	53
Tabel 4.6 Uji t.....	54
Tabel 4.7 Uji F	55
Tabel 4.8 Koefisien Determinasi.....	56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara.....	5
Gambar 1.2 Grafik Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara.....	8
Gambar 1.3 Grafik Dana Perimbangan Provinsi Sumatera Utara.....	9
Gambar 1.4 Grafik Belanja Daerah Manusia Provinsi Sumatera Utara.....	10
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	34
Gambar 4.1 Grafik Histogram.....	48
Gambar 4.2 <i>Probability Plot</i>	48
Gambar 4.3 Grafik <i>Scatterplot</i>	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil pengolahan Data (<i>Output SPSS 20</i>) Statistik Deskriptif.....	63
Lampiran 2 Hasil Pengolahan Data (<i>Output SPSS 20</i>) Uji Normalitas	63
Lampiran 3 Hasil Pengolahan Data (<i>Output SPSS 20</i>) Uji Multikolinieritas ...	64
Lampiran 4 Hasil Pengolahan Data (<i>Output SPSS</i>) Uji Autokorelasi	65
Lampiran 5 Hasil Pengolahan Data (<i>Output SPSS 20</i>) Uji Heteroskedastisitas	
Lampiran 6 Hasil Pengolahan Data (<i>Output SPSS 20</i>) Uji t.....	66
Lampiran 7 Hasil Pengolahan Data (<i>Output SPSS 20</i>) Uji F	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan suatu daerah pasti memiliki otonomi daerah masing-masing, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola dan mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan kemampuan daerah. Kemandirian pengelolaan keuangan daerah merupakan tujuan dari otonomi daerah . Seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berisi tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 berisi tentang perimbangan keuangan antara Daerah dan Pusat.. Otonomi daerah didalam pelaksanaannya tidak hanya berfokus pada bantuan dana dari pusat yang berupa dana perimbangan yang dikirim pusat ke daerah . Selanjutnya perubahan yang sangat mendasar pada pengelolaan keuangan telah terjadi pada tahun 2001 tentang otonom dalam melaksanakan otonomi daerah yang melandasinya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004, menyangkut sumber daya manusia, sumber daya lain dan dana yang merupakan kekayaan daerah agar lebih mengoptimalkan potensi pengelolaan yang dimiliki daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian di perbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berisi tentang Pemerintahan Daerah. Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1). Pengertian pendapatan asli daerah seharusnya tidak perlu menjadi perdebatan lagi karena dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur dengan jelas, objek pendapatan asli daerah dalam pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk dipungut atau tidaknya. Pada Pasal 286 ayat (2). Peraturan Daerah sebagai dasar pelaksanaan merupakan persyaratan mutlak bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pungutan, karena SKPD dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 128 ayat (2).

Dengan begitu pemerintah pusat mengharapkan pemerintahan dengan otonom daerah mampu mengurangi ketergantungan dengan pemerintah pusat, serta semakin mandiri dalam pengelolaan keuangan daerahnya sendiri agar menjadi suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam memaksimalkan pengelolaan keuangan maupun pembiayaan pembangunan perekonomian. pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintahan Pasal 4 Nomor 105 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan. apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik sesuai

dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka tentunya akan meningkatkan kinerja pemerintahan itu sendiri (Julianti, et al 2012).

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain. Agar hal ini dapat dicapai tentunya harus dilakukan langkah-langkah yang ditindak lanjuti. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang cukup penting dalam untuk melakukan aktivitas pemerintahan, menentukan kemampuan daerah dan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan.

Tetapi, dalam kenyataannya masih banyak daerah yang memiliki struktur kontribusi PAD relatif lebih rendah terhadap total penerimaan daerah. Namun, sebaliknya sebagian penerimaan pendapatan terbesar justru berasal dari instansi lebih tinggi atau pemerintah pusat, hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan yang masih sangat besar dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Kegiatan pembiayaan pembangunan daerah ini digali dari sumber kemampuan keuangan sendiri dan diharapkan dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan.

Dengan kata lain, pemerintah daerah dimotivasi agar meningkatkan kemampuan, potensinya seoptimal mungkin dalam membelanjakan urusan rumah tangganya sendiri, dengan cara menggali segala sumber dana yang potensial yang ada didaerah tersebut. Selain itu Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN, dana perimbangan juga sebagai kontribusi terbesar diatu

didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 agar pemerintahan dapat mengatur dan mengelola keuangan serta mencapai target kemandirian untuk mengelola otonom daerah.

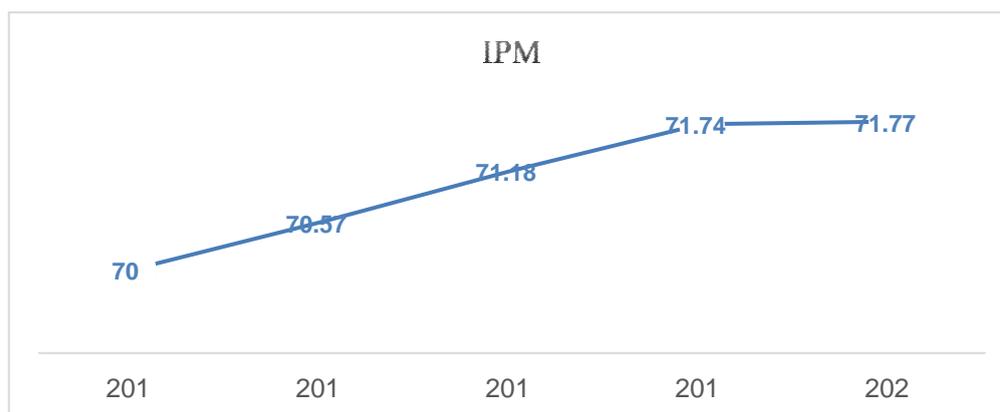
Pada umumnya kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara bersumber dari APBD, demikian halnya dengan pembangunan yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, dimana Pendapatan Asli Daerah untuk jangka panjang diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan daerah sehingga mampu membiayai sendiri pembangunan yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara agar dampaknya dapat mengurangi ketergantungan dari bantuan pemerintah pusat berupa dana perimbangan. Namun sejauh ini peranan dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan cukup baik di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, jika dilihat dari Ringkasan Laporan Realisasi dibawah ini dalam 5 (lima) Tahun kebelakang.

Gambar grafik dibawah memberikan potret rasio Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap total pendapatan seluruh pemda yang dikelompokkan pada masing-masing Provinsi di Indonesia. Menggambarkan secara agregat (Provinsi, Kabupaten dan Kota), Sumatera Utara sendiri rata-rata rasio Pendapatan Asli Daerah total pendapatan hanya mencapai 20% dan rata-rata rasio dana perimbangan atau dana transfer mencapai 80%.

Tabel 1.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran

Keterangan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
PAD	99,62%	108,21%	88,25%	81,08%	79,14%
DP	111,87%	94,99%	99,59%	97,57%	94,12%
BD	94,10	96,52%	92,18%	92,54%	81,25%
IPM	70,00	70,57	71,18	71,74	71,77

Data pada Tabel 1.1 menggambarkan realisasi anggaran pendapatan asli daerah, realisasi anggaran dana perimbangan, realisasi belanja daerah dan indeks pembangunan manusia pada provinsi Sumatera Utara dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Dana Perimbangan yang di peroleh dari pusat melalui Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan lainnya. Besarnya pembagian anggaran yang dialokasikan tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat hal ini menggambarkan bahwasannya masih tingginya ketergantungan daerah terhadap pusat yang dapat dilihat dari dana perimbangan yang diperoleh. Tentunya tujuan dari pengalokasian dana tersebut yaitu pemerataan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Perkembangan kesejahteraan masyarakat dapat dikatakan sebagai hal yang penting pada proses perencanaan pembangunan. Terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam mengamati kesejahteraan masyarakat. Pembangunan manusia sebagai proses dalam memperluas beragam pilihan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dari sisi pendidikan, kesehatan dan daya beli. Berikut disajikan grafik tabel indeks pembangunan manusia Provinsi Sumatera Utara.



Gambar 1.1

Grafik Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara

Sumber : www.bps.go.id, 5

Data di atas menggambarkan indikator kesejahteraan manusia di Provinsi Sumatera Utara yang meningkat tiap tahunnya artinya ada perkembangan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. Terjadi pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2016-2018 sebesar 2,48% akan tetapi pertumbuhan yang stagnan terjadi di tahun 2019 – 2020 yang mengindikasikan tidak ada pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia yang signifikan. Pembangunan manusia menjadi tugas pemerintah daerah terkait sesuai dengan anggaran yang dimiliki dan pembuatan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dalam prioritas pembangunan yang dibutuhkan. IPM mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen tersebut adalah peluang hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan hidup layak (*living standards*).

Sumber daya manusia dapat diukur berdasarkan pada angka harapan hidup, pendidikan dan standard hidup yang layak. Setiap daerah memiliki indeks yang berbeda hal ini mencerminkan kualitas hidup di masing masing daerah berbeda sesuai dengan karakteristik daerah dan sumber daya yang dimiliki. Dengan adanya indeks pembangunan manusia maka setiap daerah dapat diukur kualitas hidupnya dan taraf hidup agar daerah tersebut dapat melakukan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan di daerah tersebut. Fenomena masalah namun yang menjadi masalah adalah pemerataan pembangunan yang belum merata yang dapat dilihat dari Indeks embangunan Manusia di beberapa daerah di Sumatera Utara seperti pada tabel yang disajikan berikut ini :

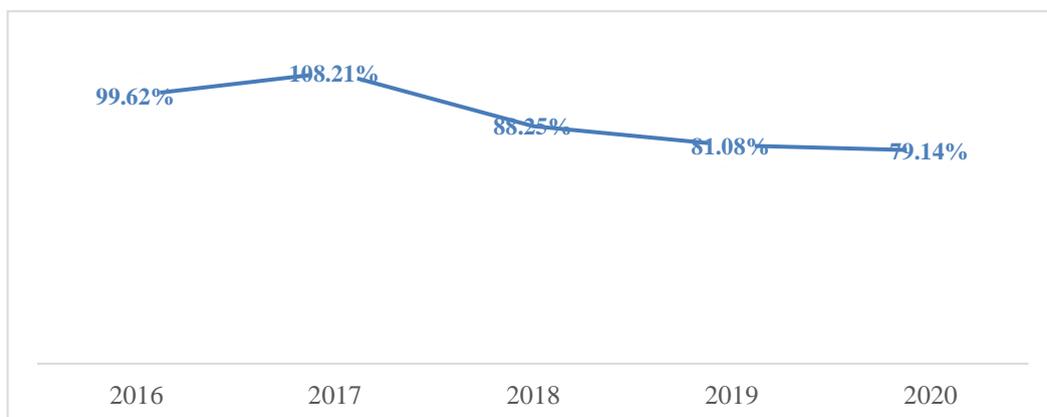
Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2020

Provinsi/Kabupaten/Kota	Tahun	
	2019	2020
Nias	61,65	61,93
Mandailing Natal	66,52	66,79
Tapanuli Selatan	69,75	70,12
Tapanuli Tengah	68,86	69,23
Tapanuli Utara	73,33	73,47
Toba Samosir	74,92	75,16
Labuhan Batu	71,94	72,01
Asahan	69,92	70,29
Simalungun	72,98	73,25
Dairi	71,42	71,57
Karo	74,25	74,43
Deli Serdang	75,43	75,44
Langkat	70,76	71,00
Nias Selatan	61,59	61,89
Humbang Hasundutan	68,83	68,87
Pakpak Bharat	67,47	67,59
Samosir	70,55	70,63
Serdang Bedagai	70,21	70,24
Batu Bara	68,35	68,36
Padang Lawas Utara	69,29	69,85
Padang Lawas	68,16	68,25
Labuhan Batu Selatan	71,39	71,40
Labuhan Batu Utara	71,43	71,61
Nias Utara	61,98	62,36
Nias Barat	61,14	61,51
Kota Sibolga	73,41	73,63
Kota Tanjung Balai	68,51	68,65
Kota Pematang Siantar	78,57	78,75
Kota Tebing Tinggi	75,08	75,17
Kota Medan	80,97	80,98
Kota Binjai	75,89	75,89
Kota Padangsidimpuan	75,06	75,22
Kota Gunungsitoli	69,30	69,31
SUMATERA UTARA	71,74	71,77

Sumber :www.bps.go.id, 2021

Tabel 1.2 menunjukkan indeks pembangunan manusia beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Utara di tahun 2019 sebesar 71,74. Beberapa daerah dengan

indeks pembangunan manusia yang tinggi di Kota Medan sebesar 80,65 diatas IPM Provinsi. Namun beberapa kabupaten di Nias masih memiliki indeks pembangunan manusia yang rendah dan dibawah IPM Provinsi Sumatera Utara. Beberapa daerah di Sumatera Utara masih tertinggal baik dari segi akses pendidikan, kesehatan sehingga indikator harapan hidup yang tidak berimbang diantara beberapa kota dan kabupaten. Hal ini tentunya menjadi suatu permasalahan bagi pemerintah daerah yang dapat menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan ekonomi secara merata sesuai amanat undang- undang otonomi daerah. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi indeks pembangunan manusia yaitu Tingkat Kemandirian Daerah. Menurut Halim (2007:232)kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman Berikut disajikan grafik realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016-2020.



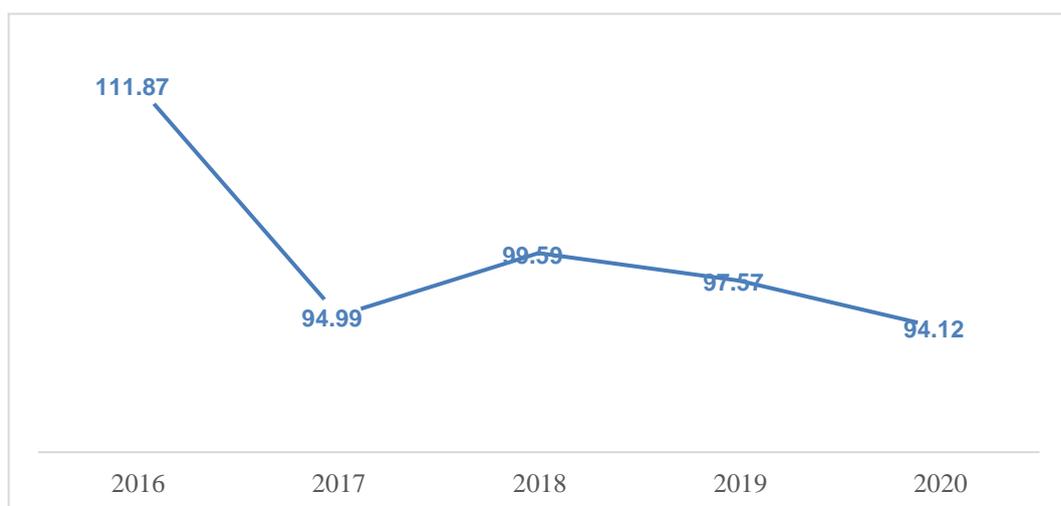
Gambar 1.2

Grafik Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara

Sumber :www.bps.go.id, 2021

Berdasarkan pada gambar grafik Pendapatan Asli Daerah di atas dapat dilihat bahwa realisasi PAD pada tahun 2016 cukup tinggi sebesar 99,62% dan meningkat menjadi 108,21% di tahun 2017 akan tetapi terjadi penurunan yang signifikan sehingga nilai realisasi PAD di tahun 2018 sebesar 88,25% menurun di tahun 2019 menjadi sebesar 81,08% dan realisasi PAD berada di titik yang rendah di tahun 2020 menjadi sebesar 79.14%. Realisasi anggaran pendapatan asli daerah yang menurun menunjukkan bahwa penyerapan anggaran pendapatan asli daerah yang rendah sehingga menyebabkan rendahnya pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah. Hal ini tentunya menjadi permasalahan bagi pemerintah daerah karena menurunnya jumlah uang kas daerah dalam rangka merealisasikan program pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.

Berikut disajikan grafik yang menggambarkan realisasi anggaran dana perimbangan Provinsi Sumatera Utara tahun 2016-2020.



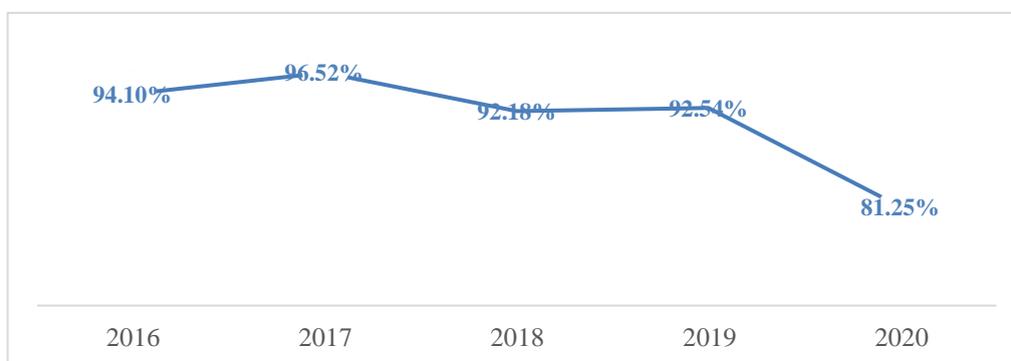
Gambar 1.3

Grafik Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Sumatera Utara

Sumber :www.bps.go.id, 2021

Realisasi dana perimbangan di tahun 2016 sangat tinggi mencapai 111,87% akan tetapi menurun cukup signifikan di tahun 2017 menjadi sebesar 94,99% dan naik di tahun 2018 menjadi 99,59% dan menurun di tahun 2019 menjadi 97,57% dan menurun di titik terendah di tahun 2020 menjadi 94,12%, Menurunnya realisasi dana perimbangan menunjukkan bahwa daerah sudah cukup mandiri dalam penggunaan anggaran yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah akan tetapi menurunnya dana perimbangan dapat menjadi kendala bagi daerah dalam menyusun program pembangunan.

Berikut disajikan grafik yang menggambarkan realisasi anggaran Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2016-2020.



Gambar 1.4

Grafik Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara

Sumber :www.bps.go.id, 2021

Realisasi Belanja Daerah di tahun 2016 cukup tinggi mencapai 94,10% dan naik di tahun 2017 menjadi 96,25% akan tetapi menurun cukup signifikan di tahun 2018 menjadi sebesar 92,18% dan naik tidak signifikan di tahun 2019 menjadi 92,54% dan mencapai nilai terendah di tahun 2020 menjadi 81,25%.

Menurunnya realisasi belanja daerah menunjukkan bahwa daerah tidak mampu menyerap anggaran dalam rangka merealisasikan program peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga proses pembangunan yang ada di daerah Provinsi Sumatera Utara terhambat. Berdasarkan uraian serta pemikiran latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti, **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Daerah Provinsi Sumatera Utara”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang dapat dipaparkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pemerataan pembangunan yang belum merata yang dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia di beberapa daerah di Sumatera Utara.
- b. Menurunnya realisasi Pendapatan Asli Daerah sehingga pemerintah daerah memiliki keterbatasan keuangan untuk membuat pembangunan kesejahteraan masyarakat.
- c. Realisasi Dana perimbangan menurun sehingga menjadi kendala bagi daerah dalam menyusun program pembangunan .
- d. Menurunnya realisasi Belanja Daerah menunjukkan bahwa daerah tidak mampu menyerap anggaran dalam rangka merealisasikan program peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga proses pembangunan yang ada di daerah Provinsi Sumatera Utara terhambat.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan indentifikasi masalah diatas maka penelitian ini dibatasi. Hal ini dilakukan agar pembahasan lebih terarah dan tidak meluas serta menyimpang dari tujuannya, yaitu mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan realisasi belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia di beberapa daerah di Sumatera Utara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah Belanja Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui di Provinsi Sumatera Utara?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Realisasi Belanja Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara secara parsial.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana perimbangan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara secara parsial.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh belanja daerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Sumatera Utara secara parsial.
- d. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja daerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia Daerah di Provinsi Sumatera Utara secara simultan.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak diantaranya :

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan peneliti mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan realisasi belanja daerah secara bersama-sama terhadap terhadap Indeks Pembangunan Manusia di beberapa daerah di Provinsi Sumatera Utara.

- b. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber tambahan referensi informasi kepada pihak pemerintahan sebagai bahan pertimbangan dalam mengelola keuangan Kabupaten/kota Sumatera Utara.

c. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap tingkat kemandirian Kabupaten/Kota Sumatera Utara.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Muliana, 2009) yang berjudul : Pengaruh rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara”. Sedangkan penelitian ini berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Daerah Provinsi Sumatera Utara”. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Keaslian Penelitian

Perbedaan	Penelitian Sebelumnya	Penelitian Ini
Nama Penulis	Muliana	Rotshalina Agustia Pasaribu
Judul Penelitian	Pengaruh rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Daerah Provinsi Sumatera Utara.”
Variabel Penelitian	Variabel Bebas : Efektifitas Pendapatan Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2),	Variabel Bebas : Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Perimbangan

	Dana Alokasi Khusus (X3) dan Variabel Terikat : Indeks Pembangunan Manusia	(X2), Belanja Daerah (X3) dan Variabel Terikat : Indeks Pembangunan Manusia
Waktu Penelitian	2009	2021
Model Penelitian	Regresi linier berganda dengan tehnik asosiatif	Regresi Linier Berganda
Tempat Penelitian	Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Definisi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku bertujuan untuk memberikan kelulasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan kemampuan melaksanakan ekonomi sendiri. Pendapatan Asli Daerah ini sendiri perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan kemandirian otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab dengan menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan dari penerimaan daerah tersebut. Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang berisi tentang “Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang berasal dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desantralisasi”.

Kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah sangat erat kaitannya dengan peningkatan kemandirian daerah. “Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi,

kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah”. Menurut (Mahmudi, 2010). Dari definisi diatas dapat disimpulkan pula bahwa Pendapatan Asli Daerah sangat penting peran dan pengaruhnya terhadap pembiayaan dan pendanaan daerah sendiri agar terciptanya tingkat pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan tingkat kemandirian yang baik.

b. Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah

Tentang perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menetapkan sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Terkandung di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendapatan Asli daerah Terdiri Dari :

1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, menurut Mariot berdasarkan Undang- undang nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

- a) pajak hotel
- b) pajak restoran

- c) Pajak hiburan
- d) pajak reklame
- e) pajak penerangan jalan
- f) pajak mineral bukan logam dan batuan
- g) pajak parkir
- h) pajak air tanah
- i) pajak sarang burung walet
- j) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan
- k) pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Selain itu jenis-jenis retribusi daerah :

- a) Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau umum dan jenis-jenis retribusi jasa umum :
 - (1) retribusi pelayanan kesehatan
 - (2) retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
 - (3) retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
 - (4) retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat

- (5) retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
 - (6) retribusi pelayanan pasar
 - (7) retribusi pengujian kendaraan bermotor
 - (8) retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 - (9) retribusi penggantian biaya cetak peta
 - (10) retribusi penyediaan dan atau penyedeton kakus
 - (11) retribusi pengolahan limbah cair
 - (12) retribusi pelayanan tera/tera ulang
 - (13) retribusi pelayanan pendidikan, dan
 - (14) retribusi pengendalian menara telekomunikasi
- b) Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Jenis-jenis retribusi usaha dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 meliputi :

- (1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- (2) Retribusi pasar grosir dan aau pertokoan
- (3) Retribusi tempat pelelangan
- (4) Rertribusi terminal
- (5) Retribusi tempat khusus parkir
- (6) Retribusi tempat penginapan/pesanggarahan/villa
- (7) Rertribusi rumah potong hewan
- (8) Retribusi tempat pelayanan kepelabuhan

- (9) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
 - (10) Retribusi penyebrangan di air dan
 - (11) Retribusi penjualan usaha daerah
- c) Retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaat ruang, penggunaan sumber daya alam, barang , prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dna menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 meliputi:

- (1) Retribusi izin mendirikan bangunan
 - (2) Retribusi izin tempat jualan minuman beralkohol
 - (3) Retribusi izin gangguan
 - (4) Retribusi izin trayek dan
 - (5) Retribusi izin usaha periklanan
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jenis pendapatan ini di rinci menurut objek pendapatan mencakup :

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD

- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN
- c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat
- d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas, Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu. Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2014.

Lain-lain pendapatan asli daerah sah seperti yang dimaksud meliputi :

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e) Komisi, potongan, atau bentuk lain sebagian akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.
- f) Hasil pajak daerah
- g) Hasil retribusi daerah
- h) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
- i) Lain-lain pendapatan asli yang sah.

2. Dana Perimbangan

a. Pengertian Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah. Menurut (Darise, 2010).

b. Sumber Dana Perimbangan

Seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan yang terdiri atas 3 (tiga) jenis sumber dana, merupakan pendanaan pelaksanaan Desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis Dana Perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Pemerintahan daerah menyatakan Dana Perimbangan meliputi :

1) Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Dana bagi hasil terdiri dari Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan dana bagi hasil bersumber daya alam.

2) Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum menurut Undang-undang nomor 23 Tahun 2014, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. DAU juga dimaksud untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) antar daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan tugasnyamelayani masyarakat (Panggabean, 2014:13).

3) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus menurut Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang perimbangan keuangan pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, “ dana alokasi khusus selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”.

Dari definisi diatas tentang dana perimbangan dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan sifatnya adalah sebagai dana bantuan dari pemerintah pusat untuk membantu mendanai kegiatan daerah namun pemerintah pusat mengharapkan pemerintahan daerah meningkatkan kemandirian pengelolaan keuanganya sendiri.

3. Belanja Daerah

a. Definisi Belanja Daerah

Anggaran menyangkut rencana kegiatan baik yang bersifat rutin maupun kegiatan pembangunan. Untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, yang terdiri dari berbagai macam jenis kegiatan maka diperlukan rencana keuangan yang akan dijalankan padamasa mendatang (biasanya satu tahun). Rencana keuangan ini disebut anggaran negara (APBN). Anggaran penfapatan dan belanja itu disusunsetiap tahun dan digunakan sebagai pedoman batas penggunaan sekaligus merupakan program kerja pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan disegala bidang. Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. (Darise, 2011).

Berkembangnya fungsi-fungsi pemerintah di daerah membuktikan bahwa peranan Pemerintah Propinsi untuk mendorong pembangunanse makin nyata, maka untuk mendukung kegiatannya Pemerintah Propinsi perlu memupuk pembentukan modal, terutama dari pajak, retribusi dan pendapatan lainnya dengan merencanakan pembangunannya secara sistematis menurut kebutuhannya. Kebijakan daerah terhadap pendapatan dan pengeluaran daerah direncanakan dalam anggaran, menurut para ahli ekonomi bahwa anggaran dapat diartikan suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu yang biasanya adalah satu tahun. Anggaran menjadi suatu rencana pembelanjaan yang merupakan suatu dasar

untuk pengambilan keputusan pengeluaran dan pengawasan selanjutnya atas pengeluaran-pengeluaran. Dari pendapat diatas dapat diambil suatu rumusan bahwa anggaran adalah rencana yang telah disusun secara sistematis dalam bentuk angka dari uang dan merupakan dasar untuk pengambilan keputusan penerimaan, pengeluaran dan pengawasan dalam waktu ke waktu.

b. Jenis Belanja Daerah

Belanja daerah terdiri dari :

- 1) Organisasi yaitu suatu kesatuan pengguna anggaran seperti DPRD dan sekretariat DPRD, kepala daerah dan wakil daerah, sekretariat daerah, serta dinas daerah dan lembaga teknis daerah lainnya.
- 2) Fungsi, misalnya pendidikan, kesehatan, dan fungsi-fungsi lainnya.
- 3) Jenis belanja yaitu seperti belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja modal /pembangunan

Kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD pada tahun anggaran tertentu adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan ualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- 2) Belanja daerah disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja RKPA tahun lalu yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan

untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

- 3) Didalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh, Pemerintah Aceh memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya meningkatkan investasi di daerah yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat secara luas, termasuk investasi bidang pendidikan.
- 4) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPA dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintah Aceh yang menjadi tanggung jawabnya, dan harus mempunyai tolok ukur yang jelas serta specific, measurable, acceptable, reliable, time (SMART) yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (BAPPEDA, 2011).

c. Fungsi Anggaran Daerah

Dalam Undang-undang No. 5 tahun 1974, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu hal yang sangat penting, yaitu:

- 1) Untuk menentukan jumlah pajak yang di bebankan kepada rakyat daerah yang bersangkutan.
- 2) Merupakan suatu saran untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
- 3) Memberikan isi dan arti kepada tanggung jawab Pemerintah Daerah umumnya dan Kepala Daerah khususnya, karena Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah itu menggambarkan seluruh kebijaksanaan pemerintah.

- 4) Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil.
- 5) Merupakan suatu pemberian kuasa kepada Kepala Daerah untuk melakukan penyelenggaraan keuangan di daerah di dalam batas-batas tertentu.

Anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan (pendapatan) dimasa yang akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun. Di samping itu anggaran merupakan alat kontrol atau pengawasan terhadap baik pengeluaran maupun pendapatan di masa yang akan datang. Sejak tahun 1967 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBN) di Indonesia disusun dan diberlakukan mulai tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Namun Khusus tahun 2000, tahun anggaran akan dimulai pada tanggal 1 April dan berakhir tanggal 31 Desember di tahun yang sama. Untuk tahun-tahun berikutnya tahun anggaran akan dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember pada tahun yang sama. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu mempunyai dua sisi, yaitu sisi penerimaan atau pendapatan dan sisi pengeluaran atau belanja.

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sumber daya manusia yang berkualitas adalah harapan bagi suatu daerah yang harus dicapai agar masyarakat dapat terhindar dari kemiskinan. Sumber daya manusia dapat diukur Berdasarkan pada angka harapan hidup, pendidikan dan standard hidup yang layak. Setiap daerah memiliki indeks yang berbeda hal ini mencerminkan kualitas hidup di masing masing daerah berbeda sesuai dengan karakteristik daerah dan sumber daya yang dimiliki. Dengan adanya indeks pembangunan manusia maka setiap daerah dapat diukur kualitas hidupnya dan taraf hidup agar daerah tersebut dapat melakukan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan di daerah tersebut.

a. Definisi Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia adalah tugas pemerintah daerah terkait sesuai dengan anggaran yang dimiliki dan pembuatan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dalam prioritas pembangunan yang dibutuhkan. IPM mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen tersebut adalah peluang hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan hidup layak (*living standards*). Peluang hidup dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir; pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas; dan hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang didasarkan pada paritas daya beli (*purchasing*

power parity).

b. Indikator Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari 3 (tiga) indeks yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan, yaitu:

- 1) Indeks Harapan Hidup
- 2) Indeks Pendidikan
- 3) Indeks Standar Hidup Layak

Rumus umum yang dipakai adalah sebagai berikut :

$$IPM = 1/3 (x_1 + x_2 + x_3) \quad [2.1]$$

Di mana :

- 1) X₁ = Indeks Harapan Hidup
- 2) X₂ = Indeks Pendidikan
- 3) X₃ = Indeks Standart Hidup Layak

Masing-masing komponen tersebut terlebih dahulu dihitung indeksnya sehingga bernilai antara 0 (terburuk) dan 1 (terbaik). Untuk memudahkan dalam analisa biasanya indeks ini dikalikan 100.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun hasil penelitian terdahulu yang penulis telah jadikan referensi adalah berikut ringkasan tabel dari peneliti-peneliti terdahulu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Riva Ubar Harahap (2011)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab./Kota Propinsi Sumatera Utara	X1 = DAU X2 = DAK X3 = DH Y = IPM	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
2	Erika Apulina Siregar (2012)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Utara	X1 = PAD X2 = DAU X3 = DAK Y = IPM	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Inpres Desa Tertinggal sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap Inpres Desa Tertinggal
3	Ramadhani dan Utomo (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi dan Dana Bantuan Pemerintah Terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia	X1 = DAU X2 = DAK X3 = DBP Y = IPM	Kuantitatif	Hasil uji hipotesis secara parsial dapat diketahui terdapat pengaruh yang signifikan variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi terhadap peningkatan indeks pertumbuhan manusia
4	Niken Kusuma Wardani (2018)	Pengaruh Aset Daerah, PAD, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	X1 = AD X2 = PAD X3 = DP X4 = BM Y = IPM	Kuantitatif	Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan aset daerah, dana perimbangan, dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia

5	Sri Purnamawaty (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara	X1 = PAD X2 = DAU X3 = DAK Y = IPM	Kuantitatif	Penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU, DAK berpengaruh terhadap IPM baik secara serempak maupun parsial.
6	Ni Kadek Herni Wijayanti1 Ida Bagus Darsana2 (2014)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Periode 2008-2013)	X1 = PAD X2 = DAU Z = Ekonomi Y = Kesejahteraan	Kuantitatif	Hasil analisis menunjukkan PAD dan DAU memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. PAD dan DAU tidak berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel yang memediasi secara penuh dalam pengaruh PAD dan DAU terhadap kesejahteraan masyarakat
7	Nindya Maharditya (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Khusus (Dak), Dana Alokasi Umum (Dau), Dan Dana Bagi Hasil (Dbh) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pengalokasian Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014)	X1 = PAD X2 = DAU X3 = DAK Z = DBS Y = IPM	Kuantitatif	PAD dan DAK berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, sedangkan DAU dan DBH tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Selanjutnya PAD dan DAK tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia melalui pengalokasian anggaran belanja modal, sedangkan DAU dan DBH berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia melalui pengalokasian anggaran belanja modal.

8	Parwoto, Muhammad Ali Fadillah, (2019)	Analisis Rasio: Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul	X : Kontribusi Pajak Daerah Y : Pendapatan Asli Daerah	Deskriptif Kualitatif	Badan keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011, Perubahan ketiga atas peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang pembentukan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul. BKAD Kabupaten Bantul mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksanaan
9	Debby Debora (2010)	Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Dalam Memenuhi APBD Pada Pemerintahan Kota Medan	X ₁ =Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Y= Dalam Memenuhi APBD Pada Pemerintahan Kota Medan	Analisis Deskriptif	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Dari Tahun 2008 - 2012 Dengan Kriteria Kemampuan Keuangan Daerah Sedang.
10	Ovina, Nizwan, dan Darman (2020)	Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bangka Belitung	X ₁ : Laju Pertumbuhan dan Kontribusi X ₂ : Pajak Daerah Y : Pendapatan Asli Daerah	Pendekatan Deskriptif Kuantitatif	Hasil Penelitian menunjukkan berdasarkan metode Penelitian Laju Pertumbuhan digunakan untuk melihat perbandingan pajak hiburan, pajak hotel dan pajak reklame antara kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung dengan dibandingkan langsung, dan hasilnya adalah Laju pertumbuhan pajak hiburan dan Pajak Hotel rata-rata selama 5 tahun lebih baik di Kabupaten Belitung diandingkan dengan Kota Pangkalpinang, sedangkan kontribusi pajak Pajak Hiburan Kota Pangkalpinang (1,05%) Lebih Baik dari Kabupaten Belitung(0,37%) Begitu juga kontribusi Pajak reklame Kota Pangkalpinang (2,23%) lebih baik dari Kabupaten Belitung yang hanya (1,06%)

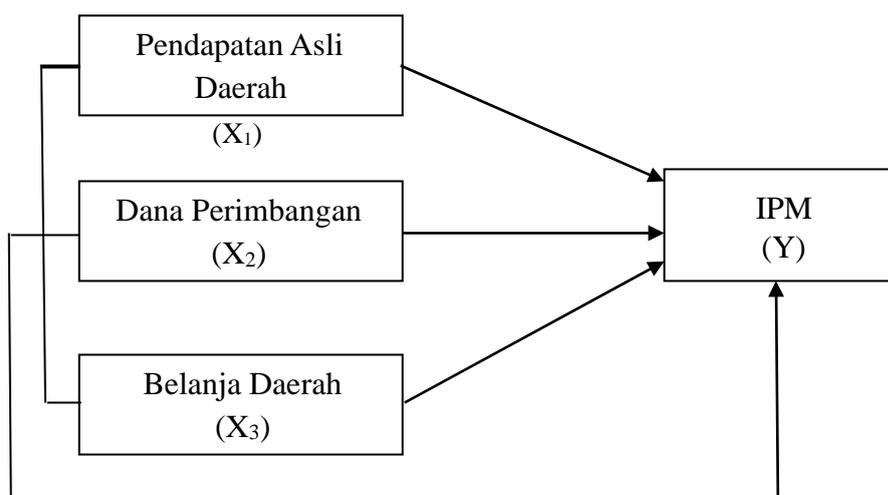
11	Julycia, Inggriani, dan Lidia (2019)	Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon	X1 : Pertumbuhan dan Kontribusi X2 : Pajak Reklame Y : Pendapatan Asli Daerah	Deskriptif Kualitatif	Dari hasil penelitian bahwa penerimaan dari target dan realisasi reklame tiap tahunnya meningkat itu berarti bahwa pertumbuhan terhadap penerimaan pajak reklame di Kota Tomohon namun berbanding terbalik dengan Pendapatan Asli Daerah yang hampir selalu tidak mencapai target dan tidak Terealisasi
12	Mayang Sari Nasution (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Deli Serdang)	PAD (X) Anggaran Belanja Modal (Y)	Kuantitatif	Berdasarkan hasil uji signifikansi parametrik (uji T) diperoleh nilai thitung sebesar 10,742 lebih besar dari nilai ttabel sebesar 2,131. Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal. atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), hal ini menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap anggaran belanja modal
13	Lily Kusumawati (2018)	Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali	Pendapatan Daerah Pertumbuhan Ekonomi	Regresi Linier Sederhana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sarbagita Provinsi Bali. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sarbagita Provinsi Bali
14	Reza Monanda Berutu (2009)	Pengaruh APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Dairi	Pengeluaran Rutin (X ₁) Pengeluaran Pembangunan (X ₂) PDRB (Y)	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Dairi
15	Mayang Sari Nasution (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Deli Serdang)	PAD (X) Anggaran Belanja Modal (Y)	Kuantitatif	Berdasarkan hasil uji signifikansi parametrik (uji T) diperoleh nilai thitung sebesar 10,742 lebih besar dari nilai ttabel sebesar 2,131. Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal. atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), hal ini

					menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap anggaran belanja modal.
16	Nindya Maharditya (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Khusus (Dak), Dana Alokasi Umum (Dau), Dan Dana Bagi Hasil (Dbh) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pengalokasian Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014)	X1 = PAD X2 = DAU X3 = DAU Z = DBS Y = IPM	Kuantitatif	PAD dan DAK berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, sedangkan DAU dan DBH tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Selanjutnya PAD dan DAK tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia melalui pengalokasian anggaran belanja modal, sedangkan DAU dan DBH berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia melalui pengalokasian anggaran belanja modal.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini merupakan suatu kajian dari berbagai konsep teori dan kajian penelitian yang terlebih dahulu. Dengan adanya kebijakan Undang-Undang terbaru tentang otonomi daerah yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu diharapkan pemerintah daerah harus siap mengatur keuangan serta mampu mengali, dan membiayai sendiri segala keperluan dan kegiatan daerahnya .dana bisa bersumber dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan potensi-potensi yang ada di daerah tersebut, kemudian dilihat pula seberapa pengaruhnya pendapatan

asli daerah dan dana perimbangan yang diterima dari pusat apakah berpengaruh positif dan negatif terhadap indeks kesejahteraan masyarakat provinsi tersebut dan apa dampaknya terhadap tingkat Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Sumatera Utara tersebut apakah Tingkat Kemandirian Semakin Tinggi atau sebaliknya. Kerangka Konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah dan masih harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual diatas,hipotesis penelitian ini adalah

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara.
2. Dana Perimbangan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara.
3. Belanja daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara.

4. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Realisasi Belanja Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih dengan penelitian ini maka akan dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala Rusiadi (2013). Pendapat lain menyatakan bahwa penelitian yang bersifat kuantitatif yaitu asosiatif kausalitas yang bertujuan untuk mengetahui derajat hubungan dan pola bentuk pengaruh antar variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Analisis data kuantitatif digunakan pada saat peneliti menggunakan pendekatan penelitian survey, penelitian eksperimen, penelitian kuantitatif dan beberapa penelitian lainnya yang mengandung data - data berupa angka - angka Manullang dan Pakpahan (2014).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dimulai dari bulan Juli sampai Desember 2021. Berikut ini tabel rencana waktu penelitian.

Tabel 3.1
Skedul Proses Penelitian

No	jenis kegiatan	2021																											
		Juli				Agustus				Sept				okt				Nov				Des							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Riset awal pengajuan judul																												
2	Penyusunan proposal																												
3	Seminar																												
4	Perbaikan ACC proposal																												
5	Pengolahan data																												
6	Penyusunan skripsi																												
7	Bimbingan skripsi																												
8	Meja Hijau																												

Sumber : Penulis, 2021

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Pada penelitian ini ditetapkan beberapa variable yang akan dianalisis venomena masalah yang terkait. Variabel penelitian pada dasarnya segala sesuatu yang berbentuk apa saja dan memiliki nilai serta variasi yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. (Rusiadi,2016). Variabel merupakan semua keadaan, faktor, kondisi, perlakuan, atau tindakan yang dapat mempengaruhi hasil eksperimen. Manullang, M dan Pakpahan (2014) menyatakan bahwa variabel merupakan suatu sifat-sifat yang dipelajari, suatu

simbol, atau lambang yang padanya melekat bilangan atau nilai, dapat dibedakan, memiliki variasi nilai atau perbedaan nilai.

Dalam penelitian ini variabel dependen adalah pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Sumatera Utara, dan untuk variabel independennya adalah anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah.

2. Definisi operasional

Definisi operasional merupakan penjabaran akan definisi variabel dan indikator pada penelitian/ Selanjutnya definisi operasional menggambarkan pula pengukuran atas variabel dan indikator yang dikembangkan pada penelitian. Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi operasional adalah penjelasan tentang batasan atau ruang lingkup variabel penelitian, sehingga memudahkan pengukuran dan pengamatan serta pengembangan instrumen/alat ukur. (Rusiadi:2016). Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang variabel penelitian, maka disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

No	Variabel	Defenisi	Pengukuran	Skala	Link Website
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Y2)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Data IPM yang digunakan adalah data IPM pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2009 sampai 2018 (dalam satuan persen), data diambil dari BPS.	$IPM = 1/3 (X1 + X2 + X3)$	Rasio	www.bps.go.id

2	Pendapatan Asli Daerah (X_1)	Merupakan jumlah PAD dandana perimbangan merupakan sumber pendapatan Daerah yang memiliki peran utama dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka Mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah.	PAD = Pajak daerah + Retribusi daerah + hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan + lain lain PAD yang sah	Rasio	www.bps.go.id
3	Dana Perimbangan (X_2)	Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah. Menurut (Darise, 2011).	DP = Bsgi hasil + DAU+DAK (Darise, 2009).	Rasio	www.bps.go.id
4	Belanja Daerah (X_3)	Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah	BD = BL + BTL (Darise, 2009).	Rasio	www.bps.go.id

Sumber : Penulis, 2021

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam melaksanakan penelitian ini, data yang dipergunakan adalah data sekunder yang berupa laporan realisasi anggaran dan laporan anggaran keuangan masing-masing Kabupaten/Kota tahunan yang telah di *release* resmi untuk umum pada periode penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang di publikasikan maupun yang tidak di publikasikan secara umum. Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh peneliti dari Badan Pusat Statistik.

E. Teknik Analisa Data

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah pengujian asumsi-asumsi statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier yang berbasis *ordinary least square* (OLS).

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian asumsi residual yang berdistribusi normal. Asumsi ini harus terpenuhi untuk model regresi linier yang baik. Uji normalitas dilakukan pada nilai residual model. Asumsi normalitas dapat diperiksa dengan pemeriksaan output normal P-P plot. Asumsi normalitas terpenuhi ketika penyebaran titik-titik output plot mengikuti garis diagonal plot.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah pengujian untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang signifikan antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linier berganda. Uji ini diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel bebas yang memiliki kemiripan dengan variabel bebas lain dalam satu model. Kemiripan antar variabel bebas dalam satu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara suatu variabel bebas dengan variabel bebas yang lainnya.

Ketentuan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas yaitu :

Jika nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* tidak lebih dari 10 (atau dibawah 10) dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1 (di atas 0,1), maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas $VIF = 1/Tolerance$, jika $VIF = 10$ maka $Tolerance = 1/10 = 0,1$. Semakin tinggi VIF maka semakin rendah *Tolerance*.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah pengujian asumsi residual yang memiliki korelasi pada periode ke-t dengan periode sebelumnya (t-1). Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya. Cara menguji autokorelasi adalah dengan melihat model regresi linier berganda terbebas dari autokorelasi apabila nilai *Durbin Watson* berada di bawah angka 2.

d. Uji Heterokedesitas

Uji heteroskedastisitas adalah suatu uji asumsi yang harus dipenuhi agar model regresi yang kita akan gunakan tidak bias.

2. Metode Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut metode analisis yang digunakan adalah model regresi linier berganda menurut Sugiyono (2014:152) bahwa Analisis regresi linier berganda bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variable independen sebagai faktor prediator dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2.

Menurut Sugiyono (2014:159) persamaan regresi linier berganda yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + e \quad [3.1]$$

Keterangan :

Y	= Indeks Pembangunan Manusia
a	= Koefisien konstanta
b ₁ b ₂ b ₃	= Koefisien regresi Berganda
X ₁	= Pendapatan Asli Daerah
X ₂	= Dana Perimbangan
X ₃	= Belanja Daerah
e	= Error

2. Uji Kesesuaian (*Test Goodness Of Fit*)

a. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Index Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk dan Tingkat Pengangguran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan pada tingkat kepercayaan (*Confidence Interval*).

Hipotesis untuk pengujian secara simultan adalah:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh signifikan secara serempak (Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia).

$H_a : \text{minimal } 1 \neq 0$, artinya terdapat pengaruh signifikan secara serempak (Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia)

Pengujian menggunakan uji F dengan kriteria pengambilan keputusan (KPK) adalah:

Terima H_0 (tolak H_a), apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $\text{Sig } F > \alpha 5\%$.

Tolak H_0 (terima H_a), apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $\text{Sig } F < \alpha 5\%$.

b. Uji Parsial (Uji t)

Uji Parsial (Uji t) menunjukkan seberapa jauh variabel bebas (Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah) terhadap variabel terikat (Indeks Pembangunan Manusia)). Untuk mengetahui diterima atau tidaknya hipotesis yang diajukan, dilakukan uji t, dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

1) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

$H_0 : \beta_1 = 0$, artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

$H_a : \beta_1 \neq 0$, artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

2) Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

$H_0 : \beta_2 = 0$, artinya Dana Perimbangan berpengaruh tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

$H_a : \beta_2 \neq 0$, artinya Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

3) Pengaruh Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

$H_0 : \beta_2 = 0$, artinya Belanja Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

$H_a : \beta_2 \neq 0$, artinya Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Pengujian signifikan dengan kriteria pengambilan keputusan (KPK) adalah:

Terima H_0 (tolak H_a), apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $Sig\ t > \alpha\ 5\%$.

Tolak H_0 (terima H_a), apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $Sig\ t < \alpha\ 5\%$.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas untuk berkontribusi terhadap variabel terikatnya dalam satuan persentase. Nilai koefisien ini antara 0 dan 1, jika hasil lebih mendekati angka 0 berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel amat terbatas. Tapi jika hasil mendekati angka 1 berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel – variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Variabel Penelitian

4.1.1 Perkembangan Variabel Penelitian

Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama Gouvernement van Sumatra dengan wilayah meliputi seluruh pulau Sumatera, dipimpin oleh seorang Gubernur yang berkedudukan di kota Medan. Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND), Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi tiga sub provinsi yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut keresidenan yaitu: Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia (R.I.) No. 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara. Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Dengan Keputusan Pemerintah Darurat R.I. Nomor 22/Pem/PDRI pada tanggal 17 Mei 1949, jabatan Gubernur Sumatera Utara ditiadakan. Selanjutnya dengan Ketetapan Pemerintah Darurat R.I. pada tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur. Kemudian, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara. Dengan Undang-Undang R.I. No. 24 Tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk Daerah Otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebahagian menjadi wilayah Provinsi Aceh.

4.1.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai nilai minimum, maksimum, rata-prata dan standar deviasi yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 4.1
Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	66	26,54895	31,45328	28,9822332	1,21863199
DAPER	66	27,73554	31,87346	30,2817850	,81492617
BelanjaDaerah	66	21,23090	32,49638	30,6166145	1,45122981
IPM	66	26,94138	32,00511	30,2389905	,93322615
Valid N (listwise)	66				

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2021

Tabel 4.1 diatas menunjukkan jumlah data (N) yang digunakan dalam penelitian sebanyak 66 sampel, nilai terendah, tertinggi, nilai rata-rata(mean) dan standar deviasi dari masing-masing variabel yang diteliti.

1. Berdasarkan pengujian statistik deskriptif variable pendapatan asli daerah memiliki nilai minimum sebesar 26,55 nilai maksimum sebesar 31,45 pada sedangkan, nilai *mean* (rata-rata) sebesar 28,98 dengan standar deviasi sebesar 1,2186.
2. Berdasarkan pengujian statistik deskriptif variabel dana perimbangan memiliki nilai minimum sebesar 27,73 dan nilai maksimum sebesar 31,87,

sedangkan nilai *mean* (rata-rata) sebesar 30,328 dengan standar deviasi 0,8149.

3. Berdasarkan pengujian statistik deskriptif variabel belanja daerah memiliki minimum sebesar 21,23 dan nilai maksimum sebesar 32,50, sedangkan nilai *mean* (rata-rata) sebesar 30,6422 dengan standar deviasi 1,4512.
4. Berdasarkan pengujian statistik deskriptif variabel indeks pembangunan manusia memiliki nilai minimum sebesar 26,94 dan nilai maksimum sebesar 32,00 sedangkan nilai *mean* (rata-rata) sebesar 30,23 dengan standar deviasi 0,9332.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Hasil Uji Asumsi Klasik

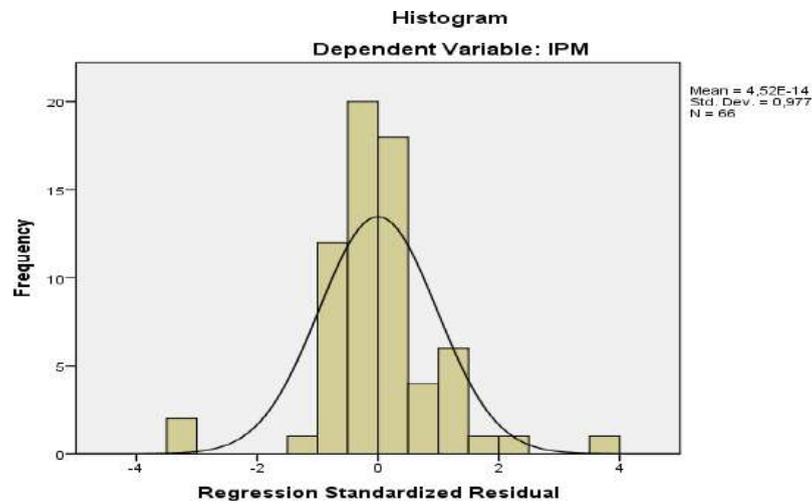
4.2.2 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk melihat normalitas residual dilakukan dengan melihat analisis grafik yaitu dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati normal dan normal *probability plot* yang dibandingkan dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

1. Analisa Grafik

Berikut ini merupakan hasil dari uji data dengan menggunakan grafik histogram dan normal *p-p plot*.

a. Grafik Histogram



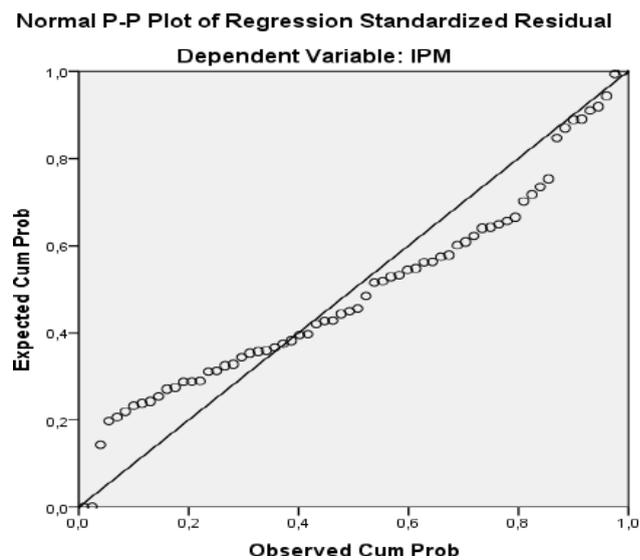
Gambar 4.1

Uji Grafik Histogram

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2021

Berdasarkan Gambar 4.1 dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal yang ditunjukkan dengan pola distribusi grafik histogram simetris dan tidak menceng kekiri maupun kekanan.

b. Normal Probability Plot



Gambar 4.2

Uji Normalitas P-P Plot

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2021

Berdasarkan Gambar 4.2 grafik normal *probability plot* menunjukkan bahwa titik-ptitik menyebar mendekati garis diagonal. Maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

2. Uji Statistik

Uji statistik non *parametric Kolmogorov Smirnov Test* dengan pedoman pengambilan keputusan tentang data mendekati atau merupakan distribusi normal dengan syarat sebagai berikut:

Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka distribusi data residual normal,

Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka distribusi data residual tidak normal.

Tabel 4.2
Uji Statistik *Kolmogorov Smirnov*
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		66
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,17032916
	Absolute	,147
Most Extreme Differences	Positive	,134
	Negative	-,147
Kolmogorov-Smirnov Z		1,191
Asymp. Sig. (2-tailed)		,117

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2021

Berdasarkan Tabel 4.2 uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,117 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

4.2.3 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

Uji multikolonieritas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*)

Jika $tolerance \leq 0,10$: terjadi gejala multikolonieritas

Jika $tolerance \geq 0,10$: tidak terjadi gejala multikolonieritas

Jika $VIF \geq 10$: terjadi gejala multikolonieritas

Jika $VIF \leq 10$: tidak terjadi gejala multikolonieritas

Tabel 4.3
Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1	PAD	,576	1,735
	DAPER	,567	1,763
	BelanjaDaerah	,978	1,022

a. Dependent Variable: IPM

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2021

Berdasarkan tabel 4.3 uji multikolonieritas menunjukkan bahwa

1. Variabel pendapatan asli daerah dengan nilai *tolerance* 0,576 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF 1,735 lebih kecil dari 10.
2. Variabel dana perimbangan dengan nilai *tolerance* 0,567 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF 1,763 lebih kecil dari 10.
3. Variabel belanja daerah dengan nilai *tolerance* 0,978 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF 1,022 lebih kecil dari 10.

Karena nilai *tolerance* yang diperoleh untuk setiap variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF yang diperoleh untuk setiap variabel lebih kecil dari 10, maka artinya data variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja daerah tidak terjadi gejala multikolonieritas.

4.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. pada penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan dengan menguji nilai *durbin-watson* (DW).

Tabel 4.4
Uji Durbin-Watson

Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	1,648

b. Dependent Variable: IPM

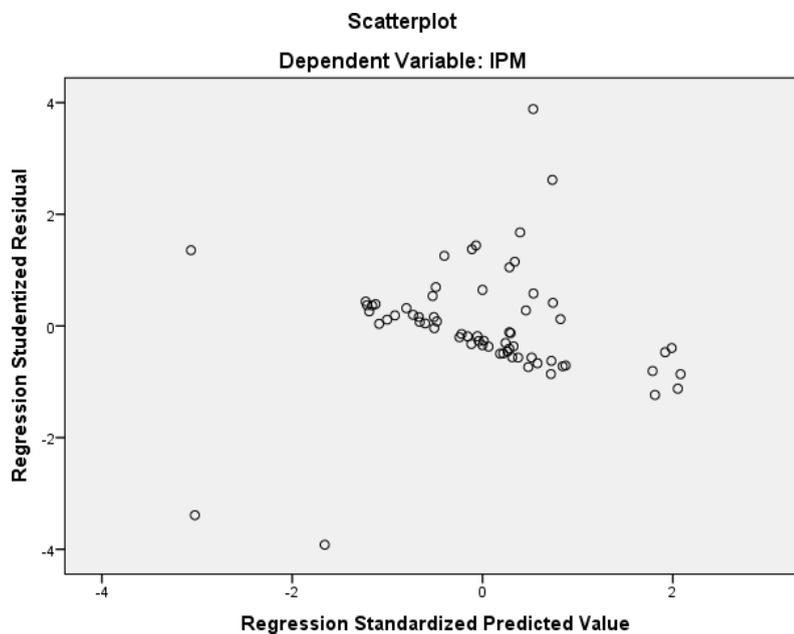
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2021

Berdasarkan teori menyatakan bahwa untuk menentukan uji ini dapat dipakai menggunakan durbin watson yaitu dengan cara melihat $dl < dw < 4 - du$, dimana $k=3$ adalah variabel bebas dan $n= 66$ adalah jumlah sampel sehingga dihasilkan bahwa nilai dl sebesar 1,5079, dw sebesar 1,648 dan nilai du sebesar 1,6974 atau $4 - 1,6974$ adalah sebesar 2,3026 sehingga $1,5079 < 1,648 < 2,3026$ yang diartikan bahwa data ini tidak terjadi autokorelasi.

4.2.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual suatu pengamatan kepengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi

heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan grafik *scaterrplot* dari uji gletser.



Gambar 4.3
Grafik Scaterrplot
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2021

Berdasarkan Gambar 4.3 grafik *scaterrplot* menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak baik diatas maupun dibawah angka nol (0) pada sumbu Y dan berkumpul disatu tempat, sehingga dari grafik *scaterrplot* dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.2.6 Model Penelitian

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis linear berganda. Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel dibawah ini menunjukkan hasil uji regresi persamaan 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Persamaan Linear Berganda

Coefficients ^a				
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
	B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-3,207	,878	
	PAD	,189	,023	,247
	DAPER	,921	,035	,804
	BelanjaDaerah	,002	,015	,004

a. Dependent Variable: IPM

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2021

Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini berdasarkan Tabel 4.6 adalah :

$$\text{Indeks Pembangunan Manusia} = -3,207 + 0,189_{\text{PAD}} + 0,921_{\text{DAPER}} + 0,002_{\text{Belanja daerah}}$$

Berdasarkan persamaan model regresi linear berganda di atas, maka dapat diartikan bahwa :

1. Nilai Konstanta regresi sebesar -3,207 apabila X_1 , X_2 , X_3 dianggap nol, maka indeks pembangunan manusia adalah sebesar -3,207.
2. Nilai satuan regresi pendapatan asli daerah sebesar 0,189 X_1 menyatakan bahwa setiap kenaikan pendapatan asli daerah satu-satuan , maka indeks pembangunan manusia akan mengalami kenaikan sebesar 0,189 satuan.
3. Nilai satuan regresi dana perimbangan sebesar 0,921 X_2 menyatakan bahwa setiap kenaikan dana perimbangan satu-satuan , maka indeks pembanguana manusia akan mengalami kenaikan sebesar 0,921 satuan.

4. Nilai satuan regresi belanja daerah sebesar 0,002 X_3 menyatakan bahwa setiap kenaikan belanja daerah satu-satuan, maka indeks pembangunan manusia akan mengalami kenaikan sebesar 0,002 satuan.

4.2.7 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji-t)

Persamaan pertama uji t dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6
Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-3,207	,878		-3,651	,001
PAD	,189	,023	,247	8,089	,000
DAPER	,921	,035	,804	26,132	,000
BelanjaDaerah	,002	,015	,004	,155	,878

a. Dependent Variable: IPM

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2021

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (Uji t) adalah sebagai berikut :

1. Pengujian hipotesis secara parsial (Uji t) untuk pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia diperoleh nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya ukuran pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pengujian hipotesis secara parsial (Uji t) untuk dana perimbangan terhadap indeks pembangunan manusia diperoleh nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya dana perimbangan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia daerah Provinsi Sumatera Utara.

3. Pengujian hipotesis secara parsial (Uji t) untuk belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia diperoleh nilai signifikan $0,878 > 0,05$ yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya belanja daerah tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia daerah Provinsi Sumatera Utara.

4.2.8 Pengujian Hipotesis Secara Simultan (uji-F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah setiap variabel independen secara simultan / bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen dapat dilihat dari persamaan pertama sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Hipotesis Secara Simultan

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	54,723	3	18,241	599,725	,000 ^b
Residual	1,886	62	,030		
Total	56,609	65			

a. Dependent Variable: IPM

b. Predictors: (Constant), Belanja Daerah, PAD, DAPER

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2021

Pada Tabel 4.8, uji signifikan secara simultan/ uji F menghasilkan F hitung sebesar 599,725 dengan derajat bebas 1 (df_1) = $k-1 = 4-1=3$, dan derajat bebas 4 (df_3) = $n-k = 66-4=62$, dimana n = jumlah sampel, k = jumlah variabel, nilai f tabel pada taraf kepercayaan signifikan 0,05 adalah 2,75 dengan demikian, F hitung = $599,725 > F$ tabel = 2,75 dengan tingkat signifikan 0,000. Maka H_1 diterima dan H_0 ditolak artinya pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja daerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Sumatera Utara.

4.2.9 Koefisien determinasi

Tabel 4.8
Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,983 ^a	,967	,965

a. Predictors: (Constant), BelanjaDaerah, PAD, DAPER

b. Dependent Variable: IPM

Sumber : Hasi Pengolahan Data SPSS, 2021

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas dapat dilihat nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,965 atau 96,5%. Hal ini berarti variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja daerah dan tingkat kemandirian hanya menjelaskan variasi variabel indeks pembangunan manusia sebesar 96,5% dan sisanya 3,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel penelitian ini.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Hasil penelitian nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Sumatera Utara.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang berhak diakui pemerintah daerah dimana pemerintah daerah memiliki wewenang mengelola sumber pendapatan yang berasal dari daerahnya. Hubungan antara dana perimbangan dengan kinerja keuangan pemerintah Provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa semakin tingginya dana perimbangan dan pendapatan asli daerah yang diterima dari pemerintah akan menunjukkan tingginya

ketergantungan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi di setiap daerahnya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Williantara & Budiasih (2016) dan Ardiansyah dan Vitalis (2014) menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

4.3.2 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil penelitian nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Sumatera Utara.

Dengan adanya dana perimbangan diharapkan pemerintah di setiap Provinsi di Indonesia dapat menggunakan sumber pendanaan tersebut untuk kegiatan dan proyek pemerintah yang konstruktif dan produktif sehingga dari kegiatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan income yang lebih besar. Dana perimbangan untuk kegiatan pembangunan daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga menyebabkan kinerja keuangan pemerintah di setiap Provinsi di Indonesia meningkat juga.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ihsan Wahyudi dan Hastuti (2020) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat.

4.3.3 Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil penelitian nilai signifikan $0,878 > 0,05$ yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Sumatera Utara.

Adanya kewenangan yang diberikan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam penyusunan anggaran yang diatur dalam UU No. 32/2004, memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah agar mengelola pembangunan daerahnya sesuai dengan proporsional daerah masing-masing. Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Priambodo, Anugrah (2015) menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap IPM sejalan dengan deskripsi diatas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan uji data maka Kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Sumatera Utara.
2. Dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Sumatera Utara.
3. Belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Sumatera Utara.
4. Pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Sumatera Utara.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran- saran yang di ajukan adalah:

1. Pemerintah provinsi selaku yang berwenang dalam mengelola keuangan setiap provinsi dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan penerimaan pendapatan Asli daerah melalui intensifikasi yaitu dengan pembinaan, dan ekstensifikasi yaitu dengan penggalian potensi , karena pendapatan asli daerah adalah penentu kemandirian daerah. Setberp pemerintah di Provinsi Sumatera Utara yang ada di Indonesia lebih meningkatkan investasi dalam bentuk fisik sehingga aset tetap tiap tahun

meningkat, sehingga dengan adanya sarana yang meningkat maka dapat mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat.

2. Diharapkan menggunakan rasio lain selain dari kinerja keuangan dan meninjau kembali variabel indepen lainnya selain yang digunakan yaitu pajak daerah, real estate ataupun faktor non keuangan seperti kebijakan pemerintah dan mikro ekonomi agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Aslan, A., Silvia, S., Nugroho, B. S., Ramli, M., & Rusiadi, R. (2020). Teacher's leadership teaching strategy supporting student learning during the covid-19 disruption. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(3), 321-333.
- Budiono. (2012). *Analisis Laporan Keuangan (Konsep dan Aplikasi)*, . Yogyakarta: YPK.
- Darise. (2011). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua*. Yogyakarta: YKPN.
- Debora, D. (2010). Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Dalam Memenuhi APBD Pada Pemerintahan Kota Medan. *Akutansi Publik*, 54-58.
- Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 20. *Universitas Diponegoro*, 56-69.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Julianti (2012). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kisra, J. (2014). Pengaruh Realisasi Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Akuntansi Publik*, 54-61.
- Kuznet. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi (2010). *Pengelolaan keuangan daerah. Pedoman untuk Eksekutif dan Legislatif*.
- Muliayana (2009). Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/ Kota Di Provinsi Sumatera Utara
- Manullang dan Pakpahan (2014). *Metodologi Penelitian Proses Penelitian Praktis*. Penerbit Cipta Pustaka Media. Bandung.
- Mardiasmo (2011) *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2008). Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol.2 No.1. Hal 1-17.

- Sujarweni (2016). *Metode Penelitian Ilmiah*. . Penerbit Cipta Pustaka Media. Bandung.
- Mayang Sari Nasution (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Deli Serdang)*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.
- Panji (2011). *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Reza Monanda Berutu (2009). *Pengaruh APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Dairi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.
- Rangkuty, D. M., & Nasution, L. N. (2018). Analisis Inflasi dan Impor Indonesia. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 18(2).
- Rusiadi, et al, (2013). *Metode Penelitian Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Pembangunan*. Medan : USU Press.
- Sekaran (2014). *Metode Penelitian Ilmiah*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Sugiyono, (2014). *Metode Peneiltian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Siahaan, A. P. U. Strategy for Improving Science and Welfare Through Community Empowerment Technology (IJCIET).
- Suroso, S., Rusiadi, R. B., Purba, A. P. U., Siahaan, A. K., Sari, A. N., & Lubis, A. I. F. (2018). Autoregression Vector Prediction on Banking Stock Return using CAPM Model Approach and Multi-Factor APT. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(9), 1093-1103.
- Sudarsana dan Rahardjo (2013). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- <http://www.bppk.depkeu.go.id>
- <http://www.bps.go.id>
- <http://www.pemprovsumba.go.id>